

TANTANGAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG KUAT DAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI INDONESIA *GREEN GROWTH PROGRAM* OLEH BAPPENAS

Alya P. Rany¹, Salsabila A. Farhani², Vidya R. Nurina³, Laila M. Pimada⁴

1. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia*

2. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia*

3. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia*

4. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia*

E-mail: alyaprastika_@student.ub.ac.id

Abstract

The Ministry of National Development Planning of Indonesia established the Green Growth Program in order to address the problems of climate change caused by economic activities. Along with the Global Green Growth Institute (GGGI), the idea of Green Growth becomes important to discuss due to the nation's priority for strong economic growth and sustainable development. Green economic growth tries to develop its program in several ways, namely the development of bankable projects, increasing green economy investment in several sectors, and designing creative and innovative economic instruments and policies. In addition, the Green Growth Program has several programs implemented, namely energy programs, energy landscape programs, special economic zones (KEK) programs, and climate fund programs. In its implementation, yet the Green Growth Program encounters many challenges. The challenges faced relate to human resources, institutional design, and trade offs faced by the state. With a qualitative approach the descriptive method the researcher explains the importance of the Green Growth Program and the challenges faced in carrying out these programs.

Keywords: *Green Growth; Economic growth; Sustainable Development.*

JEL Classifications: *O21; Q56*

1. PENDAHULUAN

Selama 15 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi 6%. Pertumbuhan ekonomi menandakan kenaikan pada *output* suatu negara yang akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Perekonomian Indonesia diharapkan terus membaik dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran industrialisasi. Sektor industri merupakan kontributor besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya persentase kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

sebesar 20,7%. Menurut United Nations Statistics Division, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara dengan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB lebih dari 10 persen pada tahun 2016.

Namun, di balik meningkatnya pencapaian negara dalam pertumbuhan ekonomi terdapat eksternalitas negatif yang terjadi. Eksternalitas negatif tersebut terjadi terhadap lingkungan alam Indonesia. Melihat kondisi geografis Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), menjadikan Indonesia bergantung kepada penggunaan SDA sebagai faktor produksi dalam menghasilkan *output*. Selain itu, penggunaan SDA tidak terbarukan untuk memfasilitasi produktivitas (seperti penguna-

an minyak bumi, dan batu bara) juga memberikan dampak buruk kepada kondisi lingkungan, seperti menimbulkan pengurangan kualitas pada udara, dan tanah. Degradasi lingkungan juga terjadi pada kondisi hutan di Indonesia yang disebabkan oleh deforestasi. Kondisi kerusakan hutan di Indonesia dibuktikan oleh data pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di mana KLHK melakukan penanganan kasus kebakaran hutan yang melibatkan lebih dari 200 perusahaan (terdiri dari perkebunan kelapa sawit, karet, dan lain-lain) pada tahun 2015 (Bram, Muhajir, & Setiawati, 2013; Everett, Ishwaran, Ansaloni, & Rubin, 2010; Hardini, 2011; Mukhlis, 2014; Winterbotham & Sophister, 2012).

Kehadiran kawasan industri yang ada di Indonesia dapat memberikan kontribusi besar kepada perubahan iklim, berupa pencemaran udara, air, tanah oleh emisi gas rumah kaca serta gas polutan karbon dioksida (CO₂) yang saat ini juga menjadi isu penting dalam lingkup global. Pengolahan limbah dari kegiatan industri yang tidak tepat menyebabkan pencemaran lingkungan. Lebih dari 550 sungai di seluruh Indonesia, 52 sungai strategis dalam kondisi tercemar, diantaranya Sungai Citarum di Jawa Barat dan Sungai Ciliwung di DKI Jakarta versi *World Wide Fund for Nature* (WWF) tahun 2019 (Baiquni, 2009; Kwanda, 2000; Sapariah, 2015; Yuliana, 2017; Zuraya, 2019).

Dengan ini dapat dilihat bahwa adanya *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan menjadi suatu tantangan yang harus di tempuh oleh pemerintah Indonesia. Melihat pada *Environmental Kuznet Curve* (EKC), hubungan antara pertumbuhan ekonomi per kapita dengan kualitas lingkungan alam menjadi sebuah hipotesis yang selayaknya sering terjadi pada negara-negara di dunia. Di mana hipotesis EKC ini menyatakan

bahwa semakin tinggi nya GDP, maka kerusakan lingkungan yang akan diterima juga semakin tinggi. Namun, pada titik tertentu tingkat kerusakan lingkungan akan mengarah kepada pengurangan walaupun tetap terjadi kenaikan pada pertumbuhan perkapita (GDP) (Pratiwi, Santosa, & Ashar, 2018; Vinod, 2001).

Trade-offs yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan menjadi suatu dilema untuk negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagaimana terdapat pada *coase theorem*, adanya peran pemerintah dapat menciptakan efektivitas dalam mengatasi permasalahan eksternalitas negatif. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan program yang sejalan dengan Rencana Jangka Menengah Pemerintah Nasional (RPJMN) 2014-2019, di mana arah kebijakan RPJMN 2014-2019 berfokus pada pembangunan nasional yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi alam dan penanganan perubahan iklim. Ditambah dengan adanya komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk menggeser paradigma pembangunan menjadi pembangunan berkualitas dengan menggunakan metode *low-carbon* dan pembangunan ramah lingkungan. Dengan adanya hal tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melakukan kerjasama dengan *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) bersama dengan Kementerian lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melaksanakan komitmen yang diwujudkan dalam program pembangunan ramah lingkungan "*Green Growth*". Meskipun ide *Green Growth Program* ini cukup menggiurkan, namun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam implementasi "*green growth program*". Oleh karena itu, pe-

nelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Indonesia dalam *green growth program* (BKF Kementerian Keuangan RI, 2019; Global Green Growth Institute, n.d.; Makmun, 2016; Yusuf, 2019; Zaini & Darmawanto, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, terdapat rumusan permasalahan yang akan dijawab pada penelitian ini, pertama, bagaimana pentingnya program *green growth* di Indonesia? Kedua, bagaimana implementasi program *green growth* yang dilakukan oleh BAPPENAS? Ketiga, bagaimana tantangan program *green growth* untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta pembangunan berkelanjutan?

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain, pertama, untuk mengetahui pentingnya program *green growth* di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui kinerja dan implementasi dari program *green growth* yang dilakukan oleh BAPPENAS. Ketiga, untuk mengetahui tantangan program *green growth* untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta pembangunan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Menurut Yasa (2010), pembangunan ekonomi akan berkembang cepat dengan menganut sistem ekonomi hijau atau *green growth*. Sistem ekonomi *green growth* ini berorientasi pada hubungan antara ekosistem alam dan sumber daya manusia dengan berdasarkan pengetahuan dan teknologi. Ekonomi hijau tidak mengandalkan bahan bakar fosil. Dengan ini, keberadaan ekonomi hijau berguna untuk meminimalkan dampak dari aktivitas ekonomi manusia terhadap perubahan iklim dan pemanasan global (Putthiwanit, 2016).

United Nation Environment Programme (UNEP), dalam kesepakatan global baru (*global green new deal*)

menyebutkan bahwa pemerintah harus mendukung perubahan ekonomi yang semula hanya mengenai profit dan kesejahteraan menjadi ekonomi hijau yang lebih berorientasi pada kelestarian lingkungan. Dengan adanya ekonomi hijau diharapkan dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang ada khususnya permasalahan iklim yang saat ini menjadi topik utama di seluruh dunia (Shachi, 2018). Menurut Meier (1995) dengan adanya kesinambungan antara pembauran antara perekonomian dan kawasan dapat memberikan berbagai manfaat, yaitu aktualisasi dan perluasan industri manufaktur regional, dan meningkatkan efisiensi melalui peningkatan perdagangan dan persaingan intensif.

Hipotesis *Environmental Kuznet Curve* (EKC) oleh Kuznet (1950) menjadi konsep yang kerap dibicarakan jika melihat permasalahan mengenai dampak lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis EKC melihat bahwa seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka degradasi lingkungan yang diterima semakin besar (Beyene & Kotosz, 2019; Churchill, Inekwe, Ivanovski, & Smyth, 2018). Dengan ini Mukhlis (2014) melihat bahwa semakin besarnya kegiatan ekonomi masyarakat akan menyebabkan meningkatnya permasalahan lingkungan. Hal ini sejalan dengan studi pada Lopez, Thomas, dan Thomas dalam Vinod (2001), perusahaan yang menjadikan sumber daya alam menjadi modal utamanya untuk mendapatkan keuntungan maka perusahaan tersebut tidak dapat mengkompensasi kerusakan alam yang disebabkan oleh aktivitas ekonominya. Menurut Djojohadikusumo dalam Utomo (2009), daya dukung alam akan terus berkurang sehingga eksploitasi pada lingkungan yang dilakukan terus-menerus hanya untuk mendapatkan keuntungan pada akhirnya akan menyebabkan terganggunya keseimbangan alam itu sendiri. Kondisi tersebut

dikenal dengan krisis lingkungan yaitu kondisi yang diakibatkan oleh kekeliruan dalam pengelolaan lingkungan. Lain halnya menurut Berry, et.al (1993) dalam Utomo (2009) menyatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan ekonominya manusia melakukan kegiatan ekonomi dan industri yang kemudian memberikan dampak buruk berupa pencemaran lingkungan. Selanjutnya ditemukan hubungan positif atau berbanding lurus antara kebutuhan manusia melalui industri dengan pencemaran lingkungan, yang artinya semakin tinggi kebutuhan manusia melalui industri maka pencemaran lingkungan juga akan semakin tinggi. Jika kondisi tersebut terjadi dalam intensitas tinggi maka akan terjadi keadaan di mana pertumbuhan ekonomi *stuck* dan kondisi lingkungan semakin memburuk tidak dapat diperbaiki kembali. Kondisi tersebut disebut *the limits to growth* yang diperkenalkan oleh Meadows.

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau *Phase II*: 2016-2020 yang ditunjukkan dalam Perpres No. 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Lembaga Internasional Pertumbuhan Hijau. Dengan adanya program tersebut, Indonesia akan bekerjasama dengan Malaysia dalam program *Palm Oil Green Economic Zone* (POGEZ) atau biasa disebut dengan Kawasan Ekonomi CPO.

Implementasi dari program *Palm Oil Green Economic Zone* (POGEZ) dilakukan di Kawasan Industri Dumai yang berada di provinsi Riau dan Kawasan Industri Berau yang berada di provinsi Kalimantan Timur. Kawasan ini dibentuk untuk mengatasi kesenjangan pembangunan sektor industri dan membangkitkan upaya pengembangan industri di seluruh wilayah yang mengedepankan prinsip *Green Industry*. *Green industry* merupakan program dua negara antara Malaysia dan Indonesia, tujuan untuk menarik para inves-

tor untuk mengembangkan bisnis industri dengan ramah lingkungan sekitar (*Palm Oil Green Economic Zone* atau kawasan tidak berpolusi).

Menurut *Indonesia Green Economy Model* (I-GEM) oleh Sukhdev, Varma, Bassi, Mumbunan, & Sonny (2015), agar transisi Ekonomi Hijau yang efektif dapat berlangsung, penting bagi Indonesia untuk memiliki indikator makro yang tepat untuk membantu mengukur kemajuan. Keempat tujuan atau indikator tersebut adalah *pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-environment*. Melalui tujuan tersebut, ditemukan bahwa indikator ekonomi makro (seperti pertumbuhan PDB, pertumbuhan PDB per kapita) tidak cocok untuk mengukur pembangunan berkelanjutan. Yang dibutuhkan Indonesia adalah tiga indikator baru yaitu "*Inclusive Wealth*" dan "*Green GDP*", "*Decent Green Jobs*" dan "*PDB of the Rural Poor*" untuk membangun jalur menuju pembangunan yang berkelanjutan, adil dan kompetitif secara ekonomi.

Ketiga indikator tersebut dihitung oleh I-GEM untuk membantu Indonesia membangun strategi pembangunan dan memasukkan perubahan ke dalam kebijakan nasional dan sub-regional yang relevan, yang mencerminkan kebutuhan sosial, lingkungan dan kondisi yang nyata dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena itu, ketiga indikator tersebut memungkinkan pemerintah membuat strategi dan rencana berdasarkan kekuatan regional yang ada, dan juga memungkinkan pemerintah provinsi untuk menilai dampak dari intervensi yang direncanakan.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Jauhari (2007), setiap penelitian menggunakan pendekatan kualitatif membutuhkan data berupa kata-kata tertulis, data wawancara atau lisan, dan kelakuan yang diamati. Menurut Kuntoro

(2005), metode deskriptif merupakan metode yang memberikan uraian atau gambaran yang jelas tanpa memberi perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pemilihan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari jurnal dengan topik yang sejenis serta bersumber dari website resmi *Green Growth* Bappenas (<http://greengrowth.bappenas.go.id/>).

Peneliti memilih cara studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Menurut Arikunto (2006), “dokumentasi” berasal dari kata dasar “dokumen” yang berarti barang tertulis. Dokumentasi yang dimaksud dari pembahasan ini yaitu berupa karya ilmiah seperti artikel, makalah, jurnal dan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis berupa membahas/menjabarkan/dikomentari.

Menurut Jauhari (2007), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penganalisisan data dengan cara pembahasan: (1) data yang digunakan haruslah data yang memiliki kesesuaian dengan masalah yang akan diteliti; (2) jumlah data yang digunakan harus merepresentasikan *sample*; (3) menjadikan pertanyaan penelitian sebagai pedoman dan (4) menentukan teori yang tepat.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Proses perkembangan industrialisasi yang cepat sejak tahun 1985-1999 memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Terbukti dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 7,9% dan angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 49% (World Bank, 1999; dalam Asian Development Bank, 2005). Namun tidak hanya berdampak baik, industrialisasi juga memberikan dampak buruk pada kondisi modal alam (SDA) Indonesia. Bertambahnya industrialisasi membuat kondisi alam mengalami

degradasi, seperti hilangnya hutan akibat penggundulan hutan oleh manusia (deforestasi), penurunan kualitas tanah (degradasi tanah), hilangnya keanekaragaman hayati, dan masalah polusi.

Dengan ini, dicanangkannya program *Green Growth Program* adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, di mana kelestarian lingkungan alam dan pertumbuhan ekonomi dapat terintegrasi dengan baik sehingga terwujudnya Indonesia yang berkualitas. Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Indonesia (*Green Growth Program*) merupakan program bersama yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan *Global Green Growth Institute* (GGGI) serta melibatkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. GGGI sendiri berdiri pada tahun 2012 dan Indonesia merupakan salah satu pendirinya. Program ini diharapkan mampu membantu Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Program *green growth* atau pertumbuhan hijau memiliki 5 capaian target jangka panjang diantaranya; pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan yang inklusif dan adil, ketahanan pada sosial-ekonomi dan lingkungan, penyediaan jasa yang produktif dan sehat pada ekosistem, pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dalam upaya melaksanakan program *Green Growth Program*, OECD memberikan beberapa rekomendasi kebijakan, meliputi *Economic Surveys*, *Environmental Performance Review*, *Innovation Reviews*, dan *Investment Policy Reviews*. Program ini sangat memperhatikan kelestarian lingkungan serta efisiensi sumber daya melalui cara:

- 1) Mengembangkan proyek *bankable*. Program ini akan mengembangkan proyek yang *bankable* la-

lu akan membantu dalam proses koneksinya.

- 2) Memasukkan faktor investasi pertumbuhan hijau dalam setiap perencanaan sektoral. Program ini berusaha memasukkan unsur-unsur yang dapat membantu kemajuan dari investasi pertumbuhan hijau dalam setiap perencanaan sektoral.
- 3) Merancang instrumen dan kebijakan ekonomi yang kreatif dan inovatif. Program ini bersama pemerintah mencoba menciptakan kondisi ekonomi yang stabil agar aliran modal pada investasi hijau terus meningkat. Hal ini juga dilakukan untuk membangun kepercayaan dari investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Memasuki pada fase ke-2 Program Pertumbuhan Hijau, program tersebut memiliki 4 program utama yaitu:

- 1) Program Energi

Program ini merupakan program Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang dilaksanakan oleh Bappenas dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Program energi dilaksanakan pada sub-sektor energi terbarukan sehingga dapat menghasilkan efisiensi energi. Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, program energi ini digunakan untuk meningkatkan porsi EBT (Energi Baru Terbarukan) hingga 23% pada tahun 2025. *Green Growth program* membantu proyek-proyek di bidang energi agar mencapai tahap *bankable* dan kemudian mendapat koneksi yang tepat sehingga dapat meningkatkan aliran dana pada proyek-proyeknya yang nantinya akan berimbas pada meningkatnya investasi hijau. Misalnya dalam pengaturan pendanaan dan mempertemukan para investor dan pengembang proyek. Saat ini program energi tengah fokus pada pe-

manfaat energi surya, pengolahan limbah kelapa sawit, dan solusi bioenergi lainnya.

- 2) Program Lanskap Berkelanjutan
Program ini merupakan program kerjasama antara BAPPENAS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Latar belakang program ini berbasis lanskap dikarenakan hutan, gambut dan lahan memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. *Green Growth Program* membantu program ini dari sisi fiskal maupun teknis. Tak jauh berbeda dengan program energi, pada *Green Growth program* juga berupaya membantu proyek-proyek di bidang kehutanan atau lanskap agar mencapai tahap *bankable* dan kemudian mendapat koneksi yang tepat sehingga dapat meningkatkan aliran dana pada proyek-proyeknya yang nantinya akan berimbas pada meningkatnya investasi hijau.
- 3) Program Kawasan Ekonomi Khusus
Program ini merupakan kerjasama antara BAPPENAS dan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sedikit berbeda dengan dua program sebelumnya, selain membantu proyek-proyek di bidang KEK agar mencapai tahap *bankable*, program KEK juga menerapkan eCBA untuk studi kelayakan proyek. Selain aliran modal pada proyek-proyek ini terus meningkat kualitas kelayakan proyek berbasis lingkungan juga semakin baik.
- 4) Program *Green Climate Fund*
Program *Green Climate Fund* adalah sebuah mekanisme pembiayaan dari UNFCCC. UNFCCC sendiri merupakan perjanjian yang dibuat untuk membantu negara-ne-

gara berkembang di bawah bendera PBB. *Green Climate Fund* memberikan dana kepada proyek-proyek di Program Ekonomi Hijau. Pembiayaan atau dana tersebut dapat diperoleh jika proyek-proyek tersebut sudah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap proyek dapat mengajukan proposal pembiayaan melalui sebuah entitas yang juga telah diakui secara nasional maupun internasional. *National Designated Authority* (NDA) adalah jembatan komunikasi utama antara suatu negara dan *Green Climate Fund*. NDA untuk Indonesia yaitu Badan Kebijakan Fiskal di bawah Kementerian Keuangan.

Dalam pelaksanaannya Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau memiliki beberapa hambatan yang dapat memperlambat kinerja dari program ini, diantaranya:

- 1) Kurangnya Penghargaan terhadap Sumber Daya Alam (SDA)
Pada hambatan ini berhubungan erat dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di mana masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memberikan perhatiannya pada lingkungan alam. Masih banyak dari masyarakat Indonesia yang belum peka terhadap kondisi lingkungan yang semakin menurun akibat kegiatan mereka sendiri. Padahal semakin terkikisnya kondisi modal alam yang dimiliki Indonesia ini akan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. *Public awareness* akan isu perubahan iklim sangat diperlukan guna mewujudkan kelestarian alam. Adanya kesadaran masyarakat akan dampak dari kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif berlebih nantinya dapat mengarah kepada penentuan kebijakan yang akan dilakukan oleh

pemerintah (Driedger, 2007; dalam Bram et al., 2013).

- 2) Investasi dengan Pola Konvensional
Masih banyak investasi di Indonesia yang menggunakan pola-pola konvensional di mana hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan. Investasi-investasi dengan pola ini justru dalam ekspansinya akan memperparah kondisi lingkungan. Poin kedua ini didasarkan oleh poin pertama di mana bentuk kesadaran masyarakat akan eksternalitas negatif menjadikan sebuah *action plan* menjadi *action* di mana pada tingkat perusahaan (*firm*) maupun perseorangan melakukan investasi yang berbasiskan pada *Green Investment*. Sebagaimana dalam program *green growth*, *Green Investment* bertujuan untuk menciptakan peluang pada model bisnis hijau yang berorientasikan tetap pada profit, namun juga bertanggung jawab atas pelaksanaan mitigasi lingkungan.
- 3) Masalah Desain Kelembagaan
Hambatan ini merupakan hambatan yang cukup sulit untuk dipecahkan karena berhubungan dengan berbagai *stakeholders*. Kelembagaan di Indonesia bisa dibilang masih kurang efisien. Hal ini dikarenakan oleh mahal nya biaya transaksi (*transaction cost*), tingginya asimetri informasi, serta tumpang tindihnya aturan atau kebijakan di Indonesia yang mengakibatkan terhambatnya program ekonomi hijau. Dikutip dari World Bank, terdapat dua alasan mengapa kinerja Indonesia dalam menanggapi isu degradasi lingkungan sekaligus menjalankan pertumbuhan ekonomi masih kurang, yaitu (1) Kurangnya komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan

kebijakan yang telah dibuat untuk mengatasi, dan mitigasi degradasi lingkungan, dan (2) Integrasi yang kecil dari segi mempertimbangkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan akibat dari perencanaan pembangunan. Dapat diartikan bahwa desain kelembagaan yang belum mapan menjadi suatu tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan isu degradasi lingkungan tersebut.

- 4) *Trade-offs* antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Hipotesis *Environmental Kuznet Curve* (EKC) mengindikasikan bahwa walau terjadinya peningkatan GDP dapat meningkatkan kerusakan lingkungan alam, namun pada titik tertentu (*stage 3*) akan terjadi penurunan pada kerusakan lingkungan seiring dengan meningkatnya GDP. Hal ini dikarenakan pada tahap ini masyarakat sudah lebih memilih untuk melakukan peningkatan pada kualitas lingkungan alam daripada konsumsi yang tidak memperhatikan eksternalitas. Pada kurva di bawah dapat mendeskripsikan kondisi *trade-offs* antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan alam.

Seperti halnya dalam teori ekonomi ekonomi klasik dimana melihat kenaikan *output* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, artinya akan semakin banyak juga dampak lingkungan yang terjadi akibat produktivitas tersebut. Dengan ini, *green growth program* berinisiasi untuk mengatasi tantangan dari adanya *trade-off* tersebut.

- 5) *Allocative efficiency* pada Anggaran Belanja Pemerintah untuk *Research and Development*. Dalam mendukung *green growth program* tentunya dibutuhkan tek-

nologi memadai yang dapat mengatasi masalah dampak dari industrialisasi. Berdasarkan teori dan konsep inovasi oleh Schumpeter (1928), *Research & Development* merupakan bentuk dari penciptaan inovasi sehingga nantinya dapat menghasilkan berbagai teknologi memadai untuk menghindari eksternalitas negatif dari industrialisasi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik melalui pemberian akses pendidikan dan penelitian yang mudah dan murah dapat mewujudkan percepatan dalam menciptakan sebuah inovasi. Instrumen kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan berupa anggaran berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di mana melalui pemberian fasilitas kepada masyarakat. Dengan prinsip *Value for Money*, perencanaan dan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan 3 (tiga) elemen dasar dalamnya, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan ini, perencanaan dan penyusunan anggaran harus bertujuan kepada *output* dan *outcome* yang akan dihasilkan sehingga nantinya penggunaan sumber daya ekonomi (berupa anggaran) menjadi termantapkan secara efisien.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

Program *green growth* sudah mulai diterapkan di Indonesia. Program ini akan membawa dampak yang baik untuk peningkatan iklim investasi di era industrialisasi di Indonesia sekarang ini. Peningkatan investasi itu sendiri nantinya akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam mengimplementasikan *Green Growth Program* Indonesia ma-

sih mengalami berbagai tantangan. Tantangan tersebut berupa kurangnya penghargaan terhadap SDA, investasi dengan pola konvensional, masalah desain kelembagaan, *trade-offs* antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, dan *allocative efficiency* pada anggaran belanja pemerintah untuk *research and development*. Sehingga tersedianya teknologi yang memadai untuk melakukan produktivitas dalam menghasilkan *output*. Dalam mengatasi masalah degradasi lingkungan, pemerintah mewujudkan komitmennya melalui *green growth program*. Dengan 2 (dua) capaian utamanya, yaitu *capacity building*, dan *green investment* menjadikan program ini memiliki nilai manfaat tinggi untuk pembangunan Indonesia ke depan yang berkelanjutan.

Program *green growth* ini tidak hanya mempertimbangkan mengenai masalah kerusakan lingkungan, namun juga mengenai *green investment*. Sehingga Program *green growth* ini diharapkan bisa diimplementasikan ke setiap sektor industri yang ada di Indonesia, untuk menciptakan iklim investasi yang baik untuk menarik para investor. Pengimplementasian program ini juga haruslah ke setiap daerah yang ada di Indonesia atau ke 34 provinsi yang ada di Indonesia melalui regulasi-regulasi Pemerintah Daerah. Sehingga nantinya seluruh masyarakat Indonesia akan memahami dan sadar betapa pentingnya program *green growth* untuk keberlangsungan dalam perekonomian maupun lingkungan. Selain itu, pelaksanaan prinsip *good governance* dalam menjalankan *green growth program* sangatlah penting agar program ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

- Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asian Development Bank. (2005). Indonesia: Country Environment Analysis. Retrieved from Asian Development Bank website: <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32184/ino-cea-aug2005.pdf>
- Baiquni, M. (2009). Revolusi Industri, Ledakan Penduduk, dan Masalah Lingkungan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, 1(1), 38–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jstl.vol1.iss1.art3>
- Beyene, S. D., & Kotosz, B. (2019). Testing the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: an Empirical Study for East African Countries. *International Journal of Environmental Studies*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00207233.2019.1695445>
- BKF Kementerian Keuangan RI. (2019). Tunjukkan Komitmen Serius Terhadap Lingkungan, OECD dan Pemerintah Indonesia Luncurkan Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau. Retrieved from Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia website: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20190715130750521862823>
- Bram, D., Muhajir, M., & Setiawati, M. (2013). *Dinamika Wacana Perubahan Iklim dan Keterkaitan dengan Hukum dan Tenurial di Indonesia: Sebuah Kajian Kepustakaan*. Jakarta: Epistema Institute.
- Churchill, S. A., Inekwe, J., Ivanovski, K., & Smyth, R. (2018). The Environmental Kuznets Curve in the OECD: 1870–2014. *Energy Economics*, 75(C), 389–399. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.20>

- 18.09.004
Everett, T., Ishwaran, M., Ansaloni, G. P., & Rubin, A. (2010). *Economic Growth and The Environment* (No. MPRA Paper 23585). Munich.
- Global Green Growth Institute. (n.d.). *Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia: Peta Jalan untuk Kebijakan, Perencanaan, dan Investasi*. Jakarta: Bappenas.
- Hardini, A. (2011). *Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kualitas Lingkungan di Kota Semarang Tahun 2001-2008*. Universitas Negeri Semarang.
- Jauhari, H. (2007). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kuntoro, R. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PPM.
- Kwanda, T. (2000). Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia. *Dimensi Teknik Arsitektur*, 28(1), 54–61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.9744/dimensi.28.1>
- Makmun. (2016). Green Economy: Konsep, Implementasi dan Peran Kementerian Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(2), 1–15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14203/JEP.19.2.2011.1-15>
- Meier, G. M. (1995). *Leading Issues in Economic Development*. New York: Oxford University Press.
- Mukhlis, I. (2014). Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, (3), 191–199.
- Perpres No. 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Lembaga Internasional Pertumbuhan Hijau.
- Pratiwi, N., Santosa, D. B., & Ashar, K. (2018). Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(1), 1–14.
- Putthiwanit, C. (2016). *An Analysis of Joseph Schumpeter's Life, Concept of Innovation, and Application for Estonia* (No. MPRA Paper No. 71126). Retrieved from <https://mprapaper.uni-muenchen.de/id/eprint/71666>
- Sapariah, S. (2015). Perizinan di Sektor Kehutanan dan Kawasan Industri jadi Lebih Mudah, Kabar Baik Atau...? Retrieved from www.mongabay.co.id website: <https://www.mongabay.co.id/2015/09/30/perizinan-di-sektor-kehutanan-dan-kawasan-industri-jadi-lebih-mudah-kabar-baik-atau/>
- Shachi, S. M. (2018). Indonesia Commits to Low Carbon Development and a Green Economy at COP24. Retrieved from www.ekuatorial.com website: <https://www.ekuatorial.com/en/2018/12/12727/>
- Sukhdev, P., Varma, K., Bassi, A. M., Mumbunan, & Sonny, E. A. and. (2015). *Indonesia Green Economy Model (I-GEM)*. LECB Indonesia and UNDP.
- Utomo, T. W. W. (2009). Keseimbangan Kepentingan Ekonomis dan Ekologis dalam Menunjang Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Retrieved from <http://nurma.staff.uns.ac.id/files/2009/03/keseimbanganekoneksi-1.pdf>
- Vinod, T. (2001). *The Quality of Growth: Kualitas Pertumbuhan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Winterbotham, A., & Sophister, J. (2012). The Solutions to Externalities: From Pigou to Coase. *The Student Economic Review*, 26, 172–180. Retrieved from <https://www.tcd.ie/Economics/assets/pdf/SER/2012/Externalities.pdf>
- Yasa, I. G. W. M. (2010). Ekonomi Hijau, Produksi Bersih dan Ekonomi Kreatif: Pendekatan Mencegah Resiko Lingkungan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Provinsi Bali. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 10(2), 285–294. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/132>
- Yuliana, R. (2017). Konflik dan Kerusakan Lingkungan (Pembangunan Pabrik Semen di Rembang). Retrieved from www.kompasiana.com website: <https://www.kompasiana.com/yelinrahmatwati/58e336fac223bdf0d177295/konflik-dan-kerusakan-lingkungan-pembangunan-pabrik-semen-di-rembang?page=all>
- Yusuf, S. I. (2019). Review Kebijakan Pertumbuhan Hijau, Ini Rekomendasi OECD untuk KLHK. Retrieved from kontan.co.id website: <https://nasional.kontan.co.id/news/review-kebijakan-pertumbuhan-hijau-ini-rekomendasi-oecd-untuk-klhk>
- Zaini, M., & Darmawanto, A. T. (2015). Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 15(2), 24–31.
- Zuraya, N. (2019). 82 Persen Sungai di Indonesia Tercemar dan Kritis. Retrieved from republika.co.id website: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/porsc1383/82-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-dan-kritis>